

**POLITIK DAN KORUPSI: PERSEPSI MASYARAKAT UTAN KAYU SELATAN  
RT. 8 RW. 12, MATRAMAN JAKARTA TIMUR TERHADAP INTEGRITAS  
POLITISI ANIES BASWEDAN 2017–2024**

Ayub Nur Syamsi dan Yana Priyatna, M.Hum.

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno  
[ayubnursyamsi21@gmail.com](mailto:ayubnursyamsi21@gmail.com),

**ABSTRAK**

Korupsi dalam ranah politik merupakan permasalahan yang terus menjadi perhatian di Indonesia, terutama di daerah Ibukota Jakarta. Anies Rasyid Baswedan merupakan salah satu tokoh Politik Nasional yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang komunikatif, religius, dan kerap menonjolkan citra antikorupsi. Selama masa kepemimpinannya hingga pasca pencalonannya sebagai capres 2024, Anies kerap menjadi sorotan publik dan media, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik terhadap kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap warga Jakarta dari berbagai latar belakang sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Utan Kayu Selatan RT. 8 RW. 12 Matraman Jakarta Timur dengan maraknya pemberitaan media massa terhadap integritas politisi Anies Baswedan dalam konteks maraknya kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang naik turun terhadap politisi. Hal ini dipengaruhi oleh paparan media yang tidak stabil serta kurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Meskipun demikian, terdapat harapan terhadap politisi muda dan figur yang dianggap memiliki rekam jejak bersih. Studi ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan integritas politisi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korupsi, Politik, Integritas Politisi, Media, Persepsi Masyarakat Utan Kayu Selatan.

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan fenomena politik yang tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik, tetapi juga melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti “busuk” atau “rusak”<sup>1</sup>. Dalam konteks Indonesia, praktik korupsi sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi pusat perhatian dalam diskursus politik dan korupsi. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, merupakan tokoh yang menempati posisi penting dalam

---

<sup>1</sup> “Pengertian Korupsi,” Zona Referensi, diakses 12 Maret 2025, <https://www.zonareferensi.com/korupsi-politik/>.

wacana politik nasional. Di satu sisi, ia dikenal sebagai figur religius dengan citra antikorupsi; di sisi lain, kinerjanya kerap menjadi sasaran kritik publik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Utan Kayu Selatan RT. 8 RW. 12, Matraman Jakarta Timur terhadap integritas Anies Baswedan selama periode 2017 hingga 2024. McCombs & Shaw menjelaskan bahwa media memiliki fungsi *agenda setting*, yakni menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik<sup>2</sup>. Dalam hal ini, pemberitaan media dapat menguatkan atau justru melemahkan citra seorang politisi. Menurut Haryatmoko, integritas berarti konsistensi antara prinsip moral dan tindakan, yang menjadi landasan bagi pejabat publik untuk menjalankan mandat kekuasaan secara bertanggung jawab<sup>3</sup>.

Max Weber membedakan legitimasi politik menjadi tiga bentuk: tradisional, kharismatik, dan legal-rasional<sup>4</sup>. Persepsi masyarakat terhadap integritas politisi, termasuk Anies, dapat dipahami melalui kerangka legitimasi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap warga Utan Kayu Selatan RT. 8 RW. 12, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan media, serta dokumen resmi. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data, sementara analisis tematik dipakai untuk mengorganisasi temuan penelitian.

## PEMBAHASAN

### Demografi Warga RT. 08 RW. 12 Matraman Jakarta Timur

Penjelasan demografi untuk wilayah RT 08 RW 12, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, ini mencakup rincian paling relevan yang dapat diakses bersama dengan data dari sumber resmi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kecamatan Utan Kayu Selatan memiliki total 173 RT, dengan satu RW 12 dan 14 RW<sup>5</sup>. Luas keseluruhan Kecamatan Utan Kayu Selatan kurang lebih 112,22 hektar, atau 1,12 km<sup>26</sup>. Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, terdapat 33.799 jiwa yang tinggal di Utan Kayu Selatan, terdiri dari 16.874 laki-laki dan 16.925 perempuan<sup>7</sup>. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Matraman tahun 2016, jumlah penduduknya di Utan Kayu Selatan mencapai 39.455 jiwa, dengan 19.696 laki-laki dan 19.759 perempuan<sup>8</sup>. Persentase penduduk di Kecamatan Matraman berpenduduk sekitar 172.180 jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan mencapai 190.523 jiwa pada pertengahan tahun 2023, dengan luas wilayah

2 Maxwell McCombs & Donald L. Shaw, *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 1972.

3 Haryatmoko, *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* (Jakarta: Magnis-Suseno, 2011), hlm. 45.

4 Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978).

5 <https://daerah.sindonews.com/read/1158745/171/6-daerah-di-jabodetabek-yang-namanya-ada-kayu-nomor-3-dan-4-sama-persis>.

6 <https://lintasjaktim.blogspot.com/2010/11/kecamatan-matraman>.

7 <https://pan-jaktim.tripod.com>.

8 <https://id.scribd.com/document/377221156/LAPTAH-Puskesmas-Kecamatan-Matraman-Tahun-2016?>

sekitar 21,66 km<sup>29</sup>. Dengan lebih dari 21% penduduk Matraman yang tinggal di Utan Kayu Selatan, desa ini merupakan desa terpadat di kecamatan ini. Karena kurangnya informasi rinci di tingkat RT/RW, perkiraan berikut diberikan setiap RT (termasuk RT 08) mungkin memiliki 600–700 penduduk jika distribusi penduduk merata di antara RT dalam satu RW misalnya, RW 12 mencakup sekitar 12 RT dan total penduduk Kelurahan sekitar 39.455 jiwa. Salah satu pusat populasi utama di Kecamatan Matraman adalah Desa Utan Kayu Selatan yang padat penduduk. Perkiraan menunjukkan bahwa RT 08/RW 12 kemungkinan besar dihuni oleh beberapa ratus penduduk, meskipun data tingkat RT belum tersedia. Asumsi ini penting untuk mengevaluasi cakupan sosial, pola interaksi penduduk, dan isu- isu sampel dalam penelitian persepsi politik.

### **Kontestasi Anies Baswedan dalam Pilkada (2017-2022)**

Anies Baswedan mulai dikenal publik secara luas saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014–2016. Namun, reputasinya sebagai politisi yang menjunjung integritas mulai diperkuat ketika ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017–2022. Selama masa jabatannya, ia menampilkan gaya komunikasi politik yang santun, intelektual, dan penuh simbolisme. Hal ini berbeda dari pendahulunya yang cenderung konfrontatif dan langsung<sup>10</sup>. Selama menjabat, tidak ada kasus hukum atau dugaan korupsi besar yang secara langsung melibatkan Anies Baswedan. Hal ini menjadi poin penting dalam persepsi publik terkait integritasnya. Beberapa kebijakan yang ia terapkan seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), integrasi transportasi publik melalui JakLingko, serta revitalisasi trotoar dan taman kota menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut juga menuai kritik terutama terkait efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan<sup>11</sup>. Salah satu momen yang memengaruhi persepsi publik adalah saat munculnya polemik anggaran DKI Jakarta pada tahun 2019, termasuk pengadaan lem Aibon senilai miliaran rupiah dalam sistem ebudgeting. Meski kemudian dijelaskan sebagai kesalahan teknis dan bukan praktik korupsi, kasus ini memunculkan pertanyaan publik terhadap transparansi dan kontrol internal di bawah kepemimpinannya<sup>12</sup>.

### **Kontestasi Anies Baswedan dalam Pemilu (2022-2024)**

Pada periode 2022 hingga 2024 saat mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Selama masa kampanyenya, ia terus mempertahankan citra sebagai pemimpin yang bersih, religius, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tidak terdapat laporan pelanggaran etika

9 [https://profilbaru.com/Matraman%2C\\_Jakarta\\_Timur?](https://profilbaru.com/Matraman%2C_Jakarta_Timur?)

10 Rachman, H.A. (2023). *Komunikasi Politik dan Strategi Elektoral Anies Baswedan*. Jakarta: LP3ES.

11 Tempo.co. (2022). "Anies Baswedan dan Skor Integritas: Antara Simbol dan Implementasi".

12 Kompas.com. (2019). "Anggaran Aneh di APBD DKI: Dari Lem Aibon hingga Bolpen Raksasa".

kampanye yang signifikan, yang semakin memperkuat persepsi sebagian masyarakat terhadap integritasnya. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap gaya komunikasinya terlalu elitis dan penuh retorika, serta mempertanyakan komitmennya terhadap reformasi struktural<sup>13</sup>. Pencalonan Presiden (Pemilihan Presiden 2024) Dukungan Partai: Anies Baswedan secara resmi dicalonkan oleh Partai NasDem pada Oktober 2022 sebagai calon presiden untuk pemilihan 2024. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung untuk mendukung pencalonannya<sup>14</sup>. Etika Kampanye dan Safari Politik: Anies melakukan safari politik meski belum resmi masuk masa kampanye, yang mana hal tersebut menarik perhatian Bawaslu karena dianggap mencuri pawai meski tidak melanggar ketentuan perundang-undangan<sup>15</sup>. Hasil Pemilu dan Permasalahan Hukum: Prabowo Subianto memperoleh 58,6% suara dalam pemilihan presiden 2024, sementara Anies hanya memperoleh sekitar 24,9%. Anies kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dengan tuduhan ketidakadilan dan campur tangan pemerintah, terutama terkait calon wakil presiden yang masih di bawah umur. Namun, gugatan tersebut akhirnya gagal, dan hasil pemilu tetap dipertahankan<sup>16</sup>.

Pilkada 2024: Sebuah Kegagalan dan Penolakan Partai-partai seperti NasDem, PKS, dan PKB sedang mempersiapkan Anies untuk bersaing sebagai kandidat oposisi dalam pemilihan gubernur Jakarta atau mungkin Jawa Barat. Namun, hingga batas waktu pendaftaran, belum ada yang mensponsorinya<sup>17</sup>. Meskipun memiliki peluang besar untuk meraih dukungan, PDIP memutuskan untuk mengajukan kandidatnya sendiri. Karena kurangnya dukungan lokal yang nyata, Anies menolak pencalonan untuk maju di Jawa Barat<sup>18</sup>. Prospek tersebut dimungkinkan oleh perubahan standar pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi realitas politik menghalangi Anies untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Pramono Anung-Rano Karno kemudian dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan ia akhirnya menang; Anies tidak mencalonkan diri<sup>19</sup>. Pasca Pemilu dan Langkah Selanjutnya Anies menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Indonesia dan akan terus memperjuangkan keyakinan politiknya di negara asalnya meskipun kalah dalam pemilihan presiden dan kepala daerah<sup>20</sup>. Mengingat banyaknya pihak saat ini yang "tersandera kekuasaan", ia menyebut potensi

13 Harian Republika. (2024). "Rekam Jejak Kampanye Anies: Citra, Program, dan Respons Publik".

14 <https://www.liputan6.com/news/read/5087301/pencalonan-anies-baswedan-ubah-peta-politik-dan-koalisi>.

15 <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/19000001/safari-politik-anies-baswedan-disorot-kapan-kampanye-pilpres-2024-dimulai>.

16

<https://apnews.com/article/dc1de6c046ab2219957f7a3000e47d4e>.

<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view>.

18 <https://www.tempo.co/politik/anies-baswedan-gagal-maju-di-pilkada-2024-ketua-dpd-pdip-jawa-barat-sebut-ada-tangan-mulyonodan-geng>. 19

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/20/mk-ubah-ambang-batas-pencalonan-anies-siap-maju-dengan-siapapun>.

20 <https://nasional.sindonews.com/read/1446223/12/gagal-bertarung-di-pilkada-2024-anies-baswedan-saya-akan-tetap-berjuang>.

munculnya ormas atau partai baru sebagai wahana politik untuk memperjuangkan demokrasi dan prinsip-prinsip yang lebih sehat<sup>21</sup>.

### **Integritas Anies Baswedan dalam Konteks Politik dan Korupsi**

Integritas dalam konteks kepemimpinan politik merujuk pada konsistensi antara ucapan, tindakan, nilai moral, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak hanya bebas dari tindak pidana korupsi, namun juga mampu menjaga kepercayaan publik, menunjukkan transparansi dalam kebijakan, serta menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan bertanggung jawab<sup>22</sup>. Anies berfokus pada dua gagasan dalam kampanye antikorupsinya sebagai calon presiden: perdagangan pengaruh (*influence peddling*) dan pengayaan secara tidak sah (*unlawful enrichment*). Sesuai dengan janjinya untuk memberantas korupsi, ia mengemukakan gagasan-gagasan ini di forum Paku Integritas KPK<sup>23</sup>. Anies telah berulang kali mengklaim bahwa perjuangannya melawan korupsi dimulai saat ia masih mahasiswa dan menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, dan bukan hal baru sebagai calon presiden. Ia bahkan mewajibkan kurikulumnya mencakup seminar antikorupsi<sup>24</sup>. Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah DKI Jakarta, ia pun membahas pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Ibu Kota setelah menjabat sebagai gubernur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa Anies terkait penerapan Formula

E. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan upaya untuk mendorong transparansi dan kerja sama dalam sistem peradilan, bukan untuk mengkriminalisasi seseorang<sup>25</sup>. Anies juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pada tahun 2015 saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, terutama terkait penyaluran dana besar untuk Pameran Buku Frankfurt. Meskipun demikian, laporan-laporan tersebut seringkali mengkritik politisasi tuduhan dan proses hukum yang tidak jelas.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkemuka, Novel Baswedan, membantah klaim bahwa ia melindungi Anies Baswedan dari kesalahan. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa meskipun keterlibatan Anies Baswedan diperlukan dalam penyelidikan, penyidik KPK harus menghindari konflik kepentingan<sup>26</sup>. Integritas dan antikorupsi di Indonesia sering dipandang sebagai wacana moral universal dalam studi

21

<https://www.bbc.com/indonesia/articles>.

22

Wijaya, D. (2021). *Etika Politik dan Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3 <https://nasional.tempo.co/read/1822826/anies-baswedan-dorong-2-konsep-pemberantasan-korupsi-kekayaan-tak-wajar-dan-perdagangan-pengaruh>. 24

<https://www.cnnindonesia.com>.

25 <https://news.detik.com>.

26 <https://www.liputan6.com>.

akademis, seperti karya Kanti Pertiwi dalam Jurnal Integritas, tetapi aplikasi praktis sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah dan budaya politik<sup>2</sup>. Penilaian terhadap integritas Anies tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik masyarakat. Persepsi masyarakat yang diteliti di RT. 8 RW. 12, Utan Kayu Selatan, menunjukkan kecenderungan positif terhadap sosok Anies. Warga menilai bahwa meskipun banyak kebijakan Anies tidak sempurna, ia tetap dianggap sebagai salah satu tokoh politik yang memiliki reputasi bersih dan berkomitmen terhadap kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa integritas politisi tidak hanya dilihat dari absennya kasus hukum, tetapi juga dari persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil<sup>28</sup>.

### **Peran Media dalam Mempengaruhi Masyarakat Utan Kayu Selatan**

Media, baik konvensional (televisi, koran) maupun digital (media sosial), berperan besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia politik. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa pola pengaruh media terhadap pembentukan opini masyarakat. Media menjadi arus utama mewarnai persepsi dasar tentang korupsi, sebagian besar warga mengenali isu korupsi politisi dari media televisi dan berita daring yang bersifat arus utama. Tokoh-tokoh yang sering muncul di berita karena tersandung kasus korupsi langsung dicap tidak memiliki integritas, bahkan tanpa menunggu proses hukum selesai. Media televisi memperkuat persepsi instan. Tokoh politik yang disebut dalam kasus korupsi langsung dianggap bersalah oleh masyarakat, karena efek pemberitaan yang membentuk opini sebelum putusan hukum keluar. Ini disebut trial by media proses opini publik lebih cepat daripada proses hukum. Media sosial sendiri memperluas spektrum kritik dan dukungan seperti warga muda dan terpelajar lebih banyak mengakses media sosial seperti Twitter, YouTube, atau TikTok untuk mencari informasi politik. Di sana, opini lebih beragam. Mulai dari kritik tajam terhadap tokoh politik hingga pembelaan dari pendukung. Media sosial memberi ruang untuk kontradiksi. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen opini. Namun, ini juga membuka ruang untuk manipulasi opini melalui buzzer politik dan hoaks, sehingga persepsi terhadap politisi bisa sangat dipolarisasi. Pemberitaan berulangpun menguatkan citra negatif tokoh politik, beberapa narasumber menyebut bahwa semakin sering nama politisi dikaitkan dengan korupsi dalam berita, maka semakin kuat citra negatif yang terbentuk, bahkan jika belum ada bukti hukum yang sah.

Frekuensi pemberitaan menciptakan efek penguatan stereotip. Dalam teori komunikasi, ini disebut agenda setting dan framing, di mana media secara tidak langsung menentukan siapa yang dianggap bermasalah dan siapa yang 'aman'. Kurangnya media netral juga membuat masyarakat ikut terpolarisasi sebagian warga menyadari bahwa media juga bisa bias terhadap tokoh atau partai politik tertentu. Oleh karena itu, ada yang tidak lagi percaya sepenuhnya pada media, dan cenderung membentuk opini berdasarkan lingkungan sosial atau pengalaman pribadi. Ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan

terhadap media juga turut membentuk persepsi masyarakat. Dalam situasi ini, otoritas moral lokal seperti tokoh agama atau tetangga lebih dipercaya dibanding media nasional. Masyarakat yang minim akses media membentuk opininya secara pasif. Beberapa warga yang tidak aktif mengakses berita atau media sosial tetap membentuk persepsi, tapi berdasarkan kesan umum atau obrolan lingkungan, bukan dari informasi faktual. Ini menunjukkan bahwa pemberitaan media juga menyebar secara tidak langsung, melalui efek sosial dari komunitas. Dalam hal ini, pembentukan opini terjadi lewat komunikasi antarpribadi, bukan media langsung, yang disebut efek *two-step flow of communication*.

Media adalah aktor penting dalam membentuk opini publik soal korupsi politisi, baik secara langsung maupun melalui penyebaran opini di lingkungan sosial. Namun efeknya juga ditentukan oleh tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap media itu sendiri. Tingkat kepercayaan juga dibentuk oleh jenis media yang dikonsumsi warga. Warga yang lebih aktif menggunakan media sosial cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis dan berimbang. Mereka dapat membandingkan Anies dengan politisi lain dari sisi kebijakan dan retorika. Sebaliknya, warga yang hanya mengandalkan media televisi arus utama cenderung memiliki pandangan lebih stabil dan positif, karena tidak terpapar narasi kontra secara luas<sup>2</sup>. Warga yang aktif di media sosial cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap politisi dan menyadari bahwa tidak semua informasi bisa dipercaya begitu saja. Sebaliknya, warga yang mengandalkan media konvensional cenderung memiliki persepsi yang lebih stabil dan pro-status quo. Hal ini membuktikan bahwa akses informasi yang beragam bisa meningkatkan kemampuan warga untuk menilai integritas secara lebih rasional, meskipun tidak selalu berdampak pada perubahan sikap politik. Persepsi juga dibentuk oleh afiliasi politik masyarakat, konsumsi media, dan diskursus di media sosial, yang sering kali bersifat bias atau tendensius, baik pro maupun kontra terhadap Anies Baswedan<sup>3</sup>. Tingkat konsumsi media juga memengaruhi persepsi warga. Mereka yang mengakses informasi dari televisi atau grup WhatsApp cenderung memiliki persepsi yang lebih statis dan cenderung percaya pada narasi populer. Sementara warga muda yang aktif di media sosial seperti Twitter dan TikTok menunjukkan sikap yang lebih kritis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tipe dan sumber media sangat berpengaruh. Media arus utama memperkuat citra populer, sementara media sosial memberi ruang bagi opini alternatif dan kritisisme. Ini menunjukkan adanya pengaruh media framing terhadap penilaian integritas politisi.

---

<sup>2</sup> Sudrajat, T. (2022). "Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Persepsi Politik Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Politik Digital*, Vol. 4, No. 2.

## Masa Pilkada

Media sebagai sumber informasi utama pengetahuan mengenai calon kepala daerah bagi masyarakat Utan Kayu Selatan, yang meliputi media sosial, portal berita daring, dan televisi. Meskipun penduduk yang lebih muda semakin bergantung pada platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp, penduduk yang lebih tua tetap menonton televisi. Hal ini mendukung kesimpulan Teori Agenda-Setting McCombs & Shaw (1972), yang menyatakan bahwa media memengaruhi opini publik dengan menentukan topik mana yang dianggap signifikan<sup>31</sup>. Warga Utan Kayu Selatan memiliki persepsi politik yang beragam, yang dipengaruhi oleh unggahan media sosial selama pemilihan gubernur Jakarta. Beberapa warga mengaku mengetahui hal-hal baik tentang Anies Baswedan dari unggahan media sosial para pendukungnya. Media yang berseberangan juga memaparkan isu-isu negatif kepada masyarakat, seperti tuduhan korupsi atau janji politik yang diingkari. Teori Paparan Selektif, yang menyatakan bahwa orang sering memilih materi yang mendukung pandangan politik mereka, konsisten dengan fenomena ini<sup>32</sup>. Media tidak hanya menyediakan berita tetapi juga bertindak sebagai senjata kampanye, seperti papan reklame digital, pesan berantai WhatsApp, dan iklan politik televisi. Siaran berita tentang pencapaian Anies sebagai Gubernur Jakarta (seperti program bantuan sosial, pendidikan, dan transportasi) dilaporkan secara rutin diterima oleh warga RT 08 RW 12. Di mata pemilih, hal ini meningkatkan reputasi kejujuran sang politisi. Selain media nasional, media lokal dan percakapan antar-rukun warga (RT/RW) juga memengaruhi opini warga Utan Kayu Selatan.

Opini publik yang disebarakan melalui obrolan santai seringkali memperkuat isu korupsi atau program yang dianggap gagal. Dalam hal ini, media bertindak sebagai ruang gema yang mendukung sudut pandang yang sudah ada, selain melaporkan berita<sup>33</sup>. Kepercayaan publik terhadap integritas politisi berfluktuasi akibat paparan media karenanya mayoritas berita di saluran yang mereka tonton baik, sebagian orang menganggap Anies jujur. Sebagian lain menjadi ragu karena terpapar korupsi dan janji-janji yang tidak terpenuhi. Dengan demikian, media secara langsung berkontribusi pada pembentukan perspektif yang terfragmentasi dan bahkan memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya selama pemilihan kepala daerah di Utan Kayu Selatan, media berperan penting dalam memengaruhi opini publik. Media sosial dan media tradisional digunakan sebagai platform utama untuk wacana diskursif, alat kampanye, dan penyebaran informasi. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap integritas politisi, terutama Anies Baswedan, bervariasi berdasarkan media yang mereka gunakan.

---

<sup>31</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 103. Maxwell McCombs & Donald Shaw, *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, Public Opinion Quarterly, 1972.

<sup>32</sup> Stroud, Natalie Jomini. *Niche News: The Politics of News Choice*. Oxford University Press, 2011.

<sup>33</sup> Eli Pariser, *The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think*. Penguin Press, 2011.

## Masa Pemilu

Media sebagai saluran informasi politik yang berarti sumber informasi utama bagi warga Utan Kayu Selatan tentang partai politik, calon legislatif, dan calon presiden adalah media, yang meliputi radio, televisi, surat kabar, media internet, dan media sosial. Mayoritas lansia yang lebih menyukai liputan berita arus utama masih menonton televisi. Bagi kaum muda yang produktif, media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan grup WhatsApp adalah sumber informasi utama mereka. Menurut teori komunikasi politik McCombs & Shaw (1972) tentang penetapan agenda, media memberi tahu individu apa yang penting untuk dipikirkan, alih-alih apa yang seharusnya mereka pikirkan<sup>34</sup>. Integritas kandidat politik sebagian dibentuk oleh media selama musim pemilu. Warga Utan Kayu Selatan menggunakan prestasi, tujuan, dan misi para kandidat yang sering ditampilkan di media nasional sebagai dasar untuk mengevaluasi integritas dan kualifikasi mereka. Namun, bias juga dapat dihasilkan oleh pembersihan media. Misalnya, kabar baik tentang kandidat tertentu membangun kepercayaan, tetapi kabar buruk (seperti skandal, korupsi, atau ingkar janji) dapat merusak reputasi kejujuran kandidat tersebut<sup>35</sup>. Platform utama untuk menyebarkan pesan kampanye selama musim pemilu antara lain Facebook, TikTok, dan grup WhatsApp RT/RW.

Pesan siaran yang mengajak warga untuk menggunakan hak pilih, film yang menampilkan prestasi para kandidat, dan bahkan rumor negatif tentang rival politik mereka seringkali dikirimkan kepada mereka. Polarisasi terjadi karena beberapa warga merasa lebih yakin dengan keputusan mereka, sementara yang lain kehilangan kepercayaan karena terpapar kampanye hitam atau berita bohong (hoaks)<sup>36</sup>. Pandangan politik warga Utan Kayu Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh media nasional, tetapi juga media lokal dan diskusi informal.

Persepsi publik diperkuat oleh diskusi yang dipicu oleh liputan media di kios makanan, posko ronda, atau forum RT/RW. Informasi yang dibagikan antar tetangga seringkali lebih dipercaya oleh warga setempat daripada berita dari media resmi. Media memiliki dampak terhadap tingkat keterlibatan politik warga negara selain membentuk opini mereka. Berita positif meningkatkan kemungkinan warga negara untuk memilih karena memberi mereka harapan bagi kandidat tertentu. Di sisi lain, masyarakat yang dibanjiri informasi palsu atau berita negatif menjadi acuh tak acuh secara politik, menganggap semua politisi sama, dan akhirnya enggan menggunakan hak pilihnya<sup>37</sup>.

<sup>34</sup>

McCombs, Maxwell & Donald Shaw. *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. Public Opinion Quarterly, 1972.

<sup>35</sup>

Entman, Robert M. *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. Journal of Communication, 1993.

<sup>36</sup>

Stroud, Natalie Jomini. *Niche News: The Politics of News Choice*. Oxford University Press, 2011.

<sup>37</sup> Eveland, William P. & Shah, Dhavan V. "The Impact of Individual and Interpersonal Factors on Perceived News Media Influence." *Political Communication*, Vol. 20, No. 1, 2003.

Selama musim pemilu, media memiliki dampak yang signifikan terhadap warga Utan Kayu Selatan. Media menyediakan informasi politik, forum untuk mengevaluasi kejujuran kandidat, forum diskusi, dan faktor yang memengaruhi keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, faktor krusial dalam memahami sikap politik akar rumput adalah media.

### **Tingkat Kepercayaan Masyarakat Utan Kayu Terhadap Integritas Politisi Anies Baswedan**

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas seorang politisi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan legitimasi kekuasaan. Kepercayaan publik terhadap politisi sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung, representasi media, rekam jejak kebijakan, serta interaksi antara elite politik dan warga. Dalam konteks masyarakat RT. 8 RW. 12, Utan Kayu Selatan, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi relatif positif terhadap integritas Anies Baswedan. Hampir semua narasumber yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mendengar Anies terlibat kasus korupsi besar. Fakta bahwa Anies Baswedan belum pernah dipanggil oleh KPK atau lembaga hukum lainnya dalam kasus korupsi menjadi faktor utama mengapa warga masih memberikan kepercayaan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa integritas, dalam persepsi masyarakat awam, kerap disamakan dengan tidak terlibat korupsi secara langsung. Beberapa warga menyoroti bahwa gaya kepemimpinan Anies yang santun, tenang, dan agamis menjadi alasan lain mengapa mereka percaya padanya. Hal ini dianggap sebagai cerminan moral pribadi yang baik, yang diasosiasikan dengan integritas tinggi. Bagi kelompok masyarakat dengan nilai-nilai religius yang kuat, kesalahan personal dianggap mencerminkan kebersihan moral pemimpin. Tingkat kepercayaan terhadap Anies juga meningkat karena kekecewaan warga terhadap tokoh-tokoh politik lain yang sering terlibat skandal korupsi. Dalam wawancara, sebagian warga menyatakan bahwa mereka tidak benar-benar yakin 100% Anies bersih, namun setidaknya lebih bisa dipercaya dibandingkan politisi lain. Tidak sedikit juga warga yang menyatakan netral karena mengaku tidak mengikuti politik. Namun sikap netral ini lebih condong pada ketidakpedulian daripada sikap kritis. Anehnya, justru dalam sikap apatis itu muncul kepercayaan pasif, yaitu sikap 'asal tidak pernah dengar buruk, berarti baik'. Tingkat kepercayaan masyarakat RT. 8 RW. 12 terhadap integritas Anies Baswedan tergolong cukup tinggi, meskipun tidak dibangun di atas dasar informasi yang sepenuhnya kritis atau akademis. Faktor ketiadaan skandal besar, gaya kepemimpinan yang religius dan santun, serta kekecewaan terhadap politisi lain memperkuat persepsi bahwa Anies memiliki integritas. Namun demikian, sebagian dari kepercayaan ini juga dibentuk oleh persepsi dangkal yang belum tentu mencerminkan

penilaian yang objektif dan rasional. Ini menunjukkan pentingnya literasi politik dalam membangun kepercayaan yang berkualitas terhadap pemimpin publik.

### **Persepsi Masyarakat Utan Kayu Terhadap Integritas Politisi Anies Baswedan**

Persepsi masyarakat merupakan proses kognitif yang melibatkan penerimaan, penafsiran, dan penilaian individu atau kelompok terhadap suatu objek, peristiwa, atau tokoh berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial-budaya mereka<sup>5</sup>. Dalam konteks politik, persepsi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai legitimasi dan kredibilitas seorang pemimpin, termasuk dalam hal integritas politik. Integritas politik sendiri merujuk pada konsistensi antara ucapan dan tindakan seorang politisi yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Seorang politisi yang berintegritas dianggap memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus Anies Baswedan, persepsi masyarakat terhadap integritasnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

**Rekam jejak kepemimpinan** – Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017–2022), kebijakan dan program Anies menjadi bahan evaluasi publik. Misalnya, program revitalisasi kawasan, pembangunan transportasi publik, serta penanganan banjir dan reklamasi Teluk Jakarta, sering menjadi sorotan media dan diskusi publik.

**Citra publik dan komunikasi politik** – Gaya komunikasi Anies yang cenderung diplomatis, religius, dan intelektual dianggap menciptakan kesan positif bagi sebagian masyarakat. Namun, sebagian lainnya menilai gaya tersebut sebagai simbolisme yang tidak selalu diiringi implementasi kebijakan yang memuaskan.

**Isu Korupsi dan transparansi** – Meskipun Anies Baswedan tidak pernah terbukti secara hukum terlibat dalam kasus korupsi besar, persepsi masyarakat tetap terbelah. Sebagian menilai ia sebagai tokoh bersih, sementara sebagian lainnya meragukan transparansi beberapa kebijakan yang dijalankan selama masa jabatannya. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap integritas Anies Baswedan bukanlah sesuatu yang homogen atau mutlak. Persepsi ini merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, interaksi sosial, informasi media, dan

bagi kelompok usia tua dan warga yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Di mata mereka, integritas dilihat dari kesalehan personal dan sikap moral. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat urban yang religius seperti di Utan Kayu, etos keislaman tokoh politik menjadi variabel penting dalam membentuk persepsi integritas.

Persepsi masyarakat Utan Kayu Selatan RT. 8 RW. 12 terhadap integritas politisi dalam konteks korupsi masih bersifat campuran antara logika perbandingan, kesalehan personal, dan kesan publik. Masyarakat cenderung tidak idealistik, tetapi mencari sosok yang “lebih baik dari yang lain” dalam kondisi politik yang mereka anggap sudah penuh kecurangan. Anies Baswedan memperoleh tingkat kepercayaan yang relatif tinggi karena dianggap belum pernah terlibat kasus korupsi, memiliki citra bersih, serta gaya kepemimpinan yang santun dan religius. Namun, kepercayaan ini belum tentu lahir dari literasi politik yang kuat, melainkan lebih karena minimnya citra negatif dan dominannya persepsi positif di ruang publik.

### **Perbandingan Perolehan Suara Anies Baswedan dalam Pilkada dan Pemilu**

Anies Baswedan, yang mendampingi Sandiaga Uno, mengumpulkan banyak pengikut di Jakarta Timur selama pemilihan kepala daerah 2017, khususnya di Kecamatan Matraman dan Utan Kayu Selatan. Tingginya perolehan suara Anies dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan lokal dan menguatnya isu-isu keagamaan, terutama setelah pertikaian politik pada masa itu. Keterikatan sentimental publik terhadap reputasi Anies sebagai sosok yang terpelajar, taat beragama, dan jujur. Dan juga meningkatnya kampanye dari rumah ke rumah di tingkat RT/RW. Hasilnya, Anies memperoleh suara mayoritas di Utan Kayu Selatan, dan banyak warga menggambarkannya sebagai sosok yang akan membawa perubahan. Perolehan suara Anies di Jakarta Timur, termasuk Utan Kayu Selatan, lebih rendah selama kampanye presiden 2024 dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah. Persentase suara Anies jauh lebih kecil dibandingkan para pesaingnya di sejumlah tempat pemungutan suara.

### **Faktor Kenaikan dan Penurunan Hasil Suara Pilkada dan Pemilu**

Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan suara itu sendiri yaitu persepsi warga terhadap kinerjanya sebagai gubernur dari tahun 2017 hingga 2022 sejumlah janji kampanye, termasuk pengendalian banjir, perumahan tanpa uang muka, dan transportasi umum, tidak sepenuhnya terpenuhi, menurut beberapa pihak. Faktor paling dominan yang membentuk persepsi masyarakat adalah apakah seorang politisi pernah terlibat kasus hukum atau tidak, khususnya terkait korupsi. Ketidakterlibatan Anies Baswedan dalam skandal besar menjadi alasan utama sebagian besar warga masih menaruh kepercayaan padanya. Masyarakat menyamakan “integritas” dengan tidak terlibat korupsi secara hukum formal, bukan berdasarkan pada kebijakan atau etika publik yang lebih dalam. Artinya, indikator hukum masih menjadi rujukan utama dalam membentuk persepsi integritas. Konteks politik

nasional persaingan yang lebih luas dengan individu- individu lain yang juga memiliki semangat serupa (misalnya, Prabowo Subianto). Peningkatan media liputan media nasional terhadap Anies cukup beragam, mulai dari yang positif hingga kritis, yang memengaruhi cara pandang masyarakat umum terhadap situasi tersebut. Adapun kelelahan politik dalam wawancara, sejumlah warga setempat mengungkapkan kekecewaan mereka atas kurangnya perubahan yang berarti, yang menyebabkan mereka mengubah pilihan mereka. Narasumber dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki argumen yang lebih rasional dalam menjelaskan penilaiannya. Mereka melihat integritas bukan hanya dari citra personal, tetapi juga dari konsekuensi kebijakan dan rekam jejak kinerja. Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kedalaman penilaian politik. Masyarakat dengan literasi politik lebih baik dapat membedakan antara simbolisme politik dan substansi kebijakan, sehingga penilaian mereka terhadap integritas lebih holistik.

Pada pilkada 2017 persentase suara tinggi karena Anies dipandang sebagai pilihan baru yang menawarkan harapan perubahan dan berkorelasi kuat dengan identitas keagamaan masyarakat Jakarta Timur. Sedangkan pilkada 2024 persentase suara menurun akibat lingkungan politik nasional yang lebih kompetitif dan persepsi bahwa kinerjanya belum memenuhi harapan. Banyak narasumber menilai integritas politisi dari realisasi kebijakan — kebijakan tak terlaksana memperlemah persepsi publik terhadap konsistensi dan akuntabilitas. Kebijakan Anies Baswedan yang Tidak Terealisasi (2017–2022):

- A. Program Rumah DP 0 Rupiah, Janji Kampanye: Membangun 232.214 unit rumah dengan skema “DP nol rupiah” bagi warga Jakarta. Realisasi: Hanya sekitar 2.322 unit dari target, jauh di bawah ekspektasi. Masalah: Mekanisme tidak jelas, pembiayaan tidak sesuai aturan BI, serta target diturunkan drastis menjadi 9.081 unit hingga 2026.
- B. Program OK OCE / JakPreneur – Lapangan Kerja Wirausaha: Janji Kampanye membuka 200.000 lapangan kerja baru melalui program kewirausahaan OK OCE. Realisasi: Hanya 6.000 orang yang menerima modal, sekitar 3 % dari target. Evaluasi: Program ini gagal menjangkau target secara signifikan dan tidak berdampak pada penurunan pengangguran DKI
- C. Penanganan Banjir: Natural/ Normalisasi Sungai & Sumur Resapan. Janji Kampanye: Menormalisasi dan menaturalisaikan sungai serta membangun 942 proyek banjir (polder, waduk, dll.). Realisasi: Realisasi normalisasi dan naturalisasi sungai 0 %, sumur resapan dihapus anggarannya sebelum rampung. Alasan: Minimnya koordinasi dengan pemerintah pusat, revisi anggaran, fokus pandemi, dan resistensi perencanaan<sup>48</sup>.

dinamika politik yang berkembang dari tahun 2017 hingga 2024. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa mereka sadar bahwa korupsi merupakan masalah sistemik dalam dunia politik Indonesia, namun mereka tetap mencari sosok yang "relatif lebih baik". Dalam hal ini, Anies Baswedan dianggap sebagai salah satu tokoh yang belum tercemar secara hukum, sehingga mendapat tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa standar integritas yang dipakai masyarakat bersifat pragmatis, yakni membandingkan tokoh satu dengan lainnya, bukan berdasarkan prinsip ideal sepenuhnya.

Mayoritas warga mengaitkan integritas politisi secara langsung dengan tidak adanya pemberitaan negatif atau panggilan hukum oleh KPK. Ketidakterlibatan Anies Baswedan dalam skandal korupsi secara langsung menjadi alasan utama mengapa ia dianggap "bersih". Hal ini menunjukkan bahwa persepsi integritas di kalangan masyarakat cenderung bersifat reaktif, yaitu berdasarkan apa yang tampak atau terdengar di media, bukan hasil penilaian kritis terhadap kebijakan atau sistem. Beberapa narasumber menyampaikan ketidaktertarikan pada politik atau mengaku tidak mengikuti berita politik secara aktif, namun tetap membentuk persepsi berdasarkan pengaruh lingkungan sekitar, media televisi, atau obrolan warga. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan tidak selalu berarti pemahaman, dan dalam banyak kasus, kepercayaan terbentuk karena ketidaktahuan atau netralitas pasif, bukan pengetahuan yang mendalam. Gaya kepemimpinan Anies yang santun, intelektual, dan religius sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat, terutama Pembangunan Infrastruktur Transportasi: LRT & ITF Janji Kampanye: Membangun jalur LRT Jakarta dan fasilitas penanganan sampah terpadu (ITF). Realisasi: 0 % realisasi, tidak ada jalur LRT dan ITF yang berjalan sesuai rencana.

- D. Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta: Janji Kampanye: Menghentikan seluruh proyek reklamasi Teluk Jakarta. Realisasi: Reklamasi tetap dilanjutkan. Pergub yang dikeluarkan justru membuka reklamasi Pulau G sebagai permukiman
- E. Revitalisasi Kawasan Monas: Janji / Rencana: Revitalisasi taman sisi selatan Monas dengan izin resmi dari pemerintah pusat. Realisasi: Ada proyek, tetapi sempat ditentang karena belum mendapat izin Komisi Pengarah Medan Merdeka. Perencanaan terlaksana tanpa koordinasi yang memadai.
- F. Pengelolaan Air dan Sumur Resapan: Janji Kampanye: Sumur resapan sebagai penanganan banjir efektif. Realisasi: Anggaran Rp300 miliar dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar lalu dihentikan. Program tidak berjalan sesuai harapan
- G. Smart City & Transparansi Pemerintahan: Janji Kampanye: Membangun kota modern dengan tata kelola yang transparan. Realisasi: Justru menutup akses publik terhadap ebudgeting sehingga masyarakat tidak dapat memantau APBD secara menyeluruh. Dengan kata lain, tingkat dukungan Anies di antara warga Utan Kayu Selatan lebih kuat selama kampanye lokalnya (pilkada) tetapi menurun setelah ia memasuki

Jurnal Communitarian, Vol. 7 No. 1, 25 Februari 2026. 2686-0589  
persaingan nasional (pilkada). Sebagian warga juga membentuk persepsi berdasarkan apa yang “sering didengar” dari tetangga, keluarga, dan obrolan warga. Ini menciptakan semacam opini kolektif yang belum tentu berbasis data atau refleksi pribadi.

Opini lingkungan sangat memengaruhi persepsi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau minat terhadap isu politik. Pola ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, persepsi integritas bisa menular melalui pembicaraan informal. Beberapa warga menilai integritas Anies secara relatif, yaitu dengan cara membandingkan dengan politisi lain yang sudah pernah tersandung kasus korupsi atau dianggap oportunistis. Persepsi integritas bersifat relatif dan kontekstual, bukan absolut. Masyarakat menilai politisi berdasarkan track record perbandingan, bukan semata-mata pada prinsip objektif integritas. Ini bisa menjadi kekuatan dan kelemahan sekaligus. Skenario ini menggambarkan betapa dinamisnya opini publik yang berarti Anies menerima banyak dukungan saat masih menjadi figur baru dan sangat terkait dengan isu-isu lokal. Namun, dukungan tersebut semakin terpolarisasi ketika publik mengevaluasi kinerjanya dan membandingkannya dengan kandidat nasional lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja yang konsisten dan menepati komitmen politik merupakan indikator kunci integritas politik, di samping citra awal seseorang.

### **Langkah-Langkah Meningkatkan Integritas Politisi dan Kepercayaan Publik**

Masyarakat merindukan tokoh politik yang jujur dan terbuka, bukan hanya pintar ber retorika. Langkah yang dapat diambil: Tokoh politik perlu melaporkan kekayaan dan asal-usul dana kampanye secara terbuka. Mengadakan forum tatap muka atau dialog terbuka secara berkala untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Menepati janji kampanye dan memberikan pelaporan berkala atas capaian kebijakan secara transparan.

Kurangnya pemahaman menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi informasi yang bias atau tidak utuh. Langkah yang perlu dilakukan: Menyelenggarakan pelatihan, diskusi warga, dan penyuluhan politik di tingkat kelurahan/RT untuk membekali masyarakat dengan pemahaman dasar politik dan hak-hak mereka. Menyediakan materi politik dalam bahasa sederhana, infografis, dan konten lokal yang mudah dicerna. Ketidakpercayaan masyarakat meningkat karena hukum dianggap tidak adil dan tidak memberikan efek jera. Untuk mengatasi ini: KPK dan lembaga penegak hukum harus konsisten menindak politisi korup, tanpa pandang bulu. Diperlukan revisi regulasi pemilu yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri, demi menjaga marwah politik. Masyarakat sangat menghargai nilai moral dan religiusitas, terutama dalam lingkungan yang dekat dengan nilai-nilai keagamaan.

Maka dari itu: Politisi perlu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan, tidak hanya simbolik (seperti berpakaian religius), tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang jujur dan adil. Aktivitas sosial nyata seperti ikut kerja bakti, hadir dalam

Jurnal Communitarian, Vol. 7 No. 1, 25 Februari 2026. 2686-0589  
musyawarah warga, dan berempati saat terjadi musibah bisa membangun kedekatan dan  
kepercayaan

Warga merasa bahwa partai politik cenderung menutup akses bagi calon-calon yang jujur namun tidak memiliki “koneksi”. Untuk memperbaiki hal ini: Mendorong partai politik untuk membuka rekrutmen kader yang lebih transparan dan berbasis merit. Perlu pengawasan masyarakat terhadap proses pencalonan legislatif dan eksekutif, agar tidak hanya diisi oleh elite lama. Warga menginginkan kedekatan yang konsisten, bukan hanya saat pemilu. Maka dari itu: Ciptakan ruang kolaboratif antara wakil rakyat dan warga dalam musyawarah pembangunan lokal, misalnya Musrenbang. Libatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah (transparansi APBD/APBN berbasis warga). Langkah-langkah berikut berasal dari harapan nyata warga dan tidak hanya bersifat normatif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Masyarakat RT 08/RW 12 Utan Kayu Selatan cenderung menilai Anies Baswedan sebagai figur yang relatif bersih karena tidak pernah terbukti secara hukum terlibat kasus korupsi. Gaya kepemimpinannya yang santun, religius, dan intelektual juga memperkuat persepsi positif. Namun, sebagian warga tetap ragu karena beberapa kebijakan tidak terealisasi maksimal (misalnya rumah DP 0 rupiah, OK OCE, penanganan banjir, dan LRT). Media konvensional (TV, koran) maupun digital (Twitter, TikTok, WhatsApp) sangat memengaruhi persepsi masyarakat. Media televisi cenderung membentuk opini instan, sedangkan media sosial melahirkan opini yang lebih beragam dan kritis, meskipun rawan bias dan hoaks. Persepsi integritas banyak terbentuk dari apa yang sering dilihat/dibaca, bukan analisis kritis. Kepercayaan warga terhadap Anies cukup tinggi, tetapi sebagian besar bersifat pragmatis dan pasif (“asal tidak pernah dengar korupsi, berarti baik”). Faktor religiusitas juga sangat berpengaruh; pemimpin yang dianggap beriman dan beradab dinilai memiliki integritas tinggi. Dukungan masyarakat lebih tinggi pada Pilkada 2017 karena faktor kedekatan emosional, agama, dan citra baru. Namun pada Pemilu 2024, suara menurun karena kinerja dianggap tidak sepenuhnya memenuhi janji, serta persaingan politik nasional lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi integritas politisi bisa naik-turun tergantung kinerja, media, dan konteks politik.

### **Saran**

Politisi perlu konsisten membuka data kekayaan, anggaran, dan capaian program secara rutin agar masyarakat tidak hanya menilai dari media, tetapi juga dari fakta resmi. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu mendorong pendidikan politik warga melalui diskusi warga, penyuluhan, atau konten sederhana agar masyarakat lebih kritis dalam menilai integritas politisi. Lembaga hukum harus menindak tegas kasus korupsi tanpa

pandang bulu serta memperketat aturan pencalonan bagi mantan terpidana korupsi. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menghargai pemimpin yang santun, religius, dan beradab. Politisi perlu menunjukkan konsistensi nilai moral tidak hanya dalam simbol, tetapi juga dalam kebijakan nyata. Partai politik sebaiknya membuka ruang bagi kader yang kompeten dan berintegritas, bukan hanya dari lingkaran elite, agar masyarakat percaya bahwa ada regenerasi politik yang sehat. Politisi perlu hadir di masyarakat tidak hanya saat kampanye, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari, termasuk musyawarah pembangunan dan pengawasan anggaran berbasis warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, Hasrul Hanif, Gun Gun Heryanto, Agus Wahyudi, Airlangga Pribadi Kusman, Nur Azizah, *Modul Kelas Politik Cerdas Berintegritas (Pcb) Untuk Siswa Sma/Sederajat*, Vol 1, (Jakarta: KPK, 2016), hlm. 8.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Antoni Barnard, Willem Shurink, dan Marie de Bee, “Fungsi Integritas,” *Makalah A Conceptual Framework of Integrity*, (2008): hlm. 73.
- BBC News Indonesia. (2023). *Skandal Korupsi di Indonesia: Mengapa Kepercayaan Publik terhadap Politisi Terus Menurun?* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia>.
- Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 103.
- David, Marsh., & Gerry, Stoker. (2017). *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. 2(9). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Easton, D. (1975). *A Re-Assessment of the Concept of Political Support*. *British Journal of Political Science*, 5(4), 435–457.
- Eli Pariser, *The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think*. Penguin Press, 2011.
- Entman, Robert M. *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, 1993.
- Eveland, William P. & Shah, Dhavan V. “The Impact of Individual and Interpersonal Factors on Perceived News Media Influence.” *Political Communication*, Vol. 20, No. 1, 2003.
- Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Houghton Mifflin.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Harian Republika. (2024). “Rekam Jejak Kampanye Anies: Citra, Program, dan Respons Publik”.

- Jurnal Communitarian, Vol. 7 No. 1, 25 Februari 2026. 2686-0589
- Haryatmoko, (2011). *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Magnis-Suseno, F. 45.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 51.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Daftar Pejabat Negara dengan Status Hukum Aktif*. [Diakses 15 Juni 2025].
- Kompas.com. (2019). “Anggaran Aneh di APBD DKI: Dari Lem Aibon hingga Bolpen Raksasa”.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2022). *Survei Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi dan Integritas Politisi di Indonesia*. Jakarta: LSI.
- Maxwell McCombs & Donald L. Shaw, *The Agenda-Setting Function of Mass Media*, *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 1972.
- Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978).
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Rachman, H.A. (2023). *Komunikasi Politik dan Strategi Elektoral Anies Baswedan*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Y. (2020). *Apatisme Politik dan Efeknya terhadap Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat.
- Stroud, Natalie Jomini. *Niche News: The Politics of News Choice*. Oxford University Press, 2011.
- Sudrajat, T. (2022). “Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Persepsi Politik Masyarakat Perkotaan”, *Jurnal Politik Digital*, Vol. 4, No. 2.
- Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Kontrol Sosial: Studi Tentang Integritas Elite Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 88.
- Tempo.co. (2022). “Anies Baswedan dan Skor Integritas: Antara Simbol dan Implementasi”.
- The Jakarta Post. (2023). *Public Trust in Indonesian Politicians Hits New Low Amid Corruption Cases*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com>.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahid, A. (2013). *Korupsi dan Demokrasi: Tantangan Pemberantasan Korupsi di Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara Lapangan. (2025). Data Primer: Warga RT. 8 RW. 12 Utan Kayu Selatan.

Jurnal Communitarian, Vol. 7 No. 1, 25 Februari 2026. 2686-0589  
Wijaya, D. (2021). *Etika Politik dan Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum, “Pengertian Politik Menurut Para Ahli,” diakses  
12 Maret 2025, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-politik/>.